KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sisa RUU Dilimpahkan ke DPR 2019-2024
Tanggal : Sabtu, 28 September 2019
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Sisa RUU Dilimpahkan ke DPR 2019-2024

DPR periode 2015-2019 tidak akan lagi mengambil keputusan terhadap sejumlah RUU di rapat paripurna akhir pada 30 September.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat memastikan tidak ada lagi pengesahan revisi ataupun rancangan undang-undang dalam rapat paripurna akhir masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019. Oleh karena itu, sejumlah revisi ataupun rancangan undang-undang yang belum tuntas akan dibahas oleh DPR periode berikutnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, rapat paripurna akhir masa jabatan pada Senin (30/9/2019) hanya akan diisi dengan agenda penutupan masa sidang dan pidato Ketua DPR. Sehari kemudian, Selasa (1/10), akan dilaksanakan pelantikan anggota DPR periode 2019-2024.

"Saya pastikan, sudah tidak ada lagi pengambilan keputusan terhadap sejumlah revisi ataupun rancangan undang-undang karena agendanya hanya penutupan masa sidang dan pidato perpisahan dari saya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar empat RUU ditunda pengesahannya. Keempat RUU itu adalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Minerba, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan. Presiden pun meminta agar sejumlah ketentuan tersebut bisa dibahas oleh anggota DPR periode berikutnya.

Menurut Bambang, DPR telah menyepakati penundaan pengesahan empat RUU tersebut. Pembahasan RUU Minerba dan RUU Pertanahan bahkan selesai, tetapi belum memasuki pengambilan keputusan tingkat pertama sehingga belum bisa disahkan.

Selain itu, pada Rabu (25/9), DPR telah menyetujui pengesahan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang mengatur tentang sistem luncuran (*carry over*) dalam sistem legislasi.

Dengan demikian, sejumlah RUU yang belum selesai pembahasannya bisa dilanjutkan oleh anggota DPR periode berikutnya. Syaratnya, pembahasannya sudah sampai pada tahap daftar inventaris masalah (DIM).

RUU KKS dibatalkan

Ketua Panitia Khusus RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) Bambang Wuryanto yang juga anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P mengatakan, pembahasan RUU ini tidak bisa dilanjutkan oleh anggota DPR periode berikutnya.

"Seharusnya hari ini (Jumat kemarin), perwakilan pemerintah menyerahkan DIM terkait pembahasan RUU KKS. Namun, tidak ada perwakilan pemerintah yang hadir pada hari ini," ucapnya.

Wuryanto juga menjelaskan DIM tersebut seharusnya sudah siap diserahkan. Namun, ternyata Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi perwakilan pemerintah tidak bisa menghadiri rapat.

"Berdasarkan informasi yang saya terima, para menteri sedang melakukan rapat konsolidasi dengan Presiden sehingga berhalangan hadir," ujarnya.

Kinerja

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) telah merilis hasil kinerja DPR periode 2014-2019. Berdasarkan catatan Formappi, DPR periode ini hanya mengesahkan 84 rancangan undang-undang selama lima tahun masa jabatan.

"Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan DPR periode 2009-2014 yang mampu menghasilkan 125 RUU," kata peneliti Formappi, Lucius Karus.

Berdasarkan rincian Formappi, dari 84 RUU yang disahkan DPR periode kali ini, 35 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Sisanya, 49 RUU merupakan RUU kumulatif terbuka.

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR tecermin dari jajak pendapat *Kompas*, 18-19 September 2019, yang melibatkan 529 responden. Sebanyak 66,2 persen responden merasa belum terwakili aspirasinya oleh DPR 2014-2019. Mayoritas responden juga tidak puas pada kinerja DPR, baik dalam fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran.

Dari tiga fungsi itu, responden paling tidak puas pada fungsi legislasi. Sebanyak 63,7 persen responden menyatakan tidak puas, 24,4 persen menyatakan puas, dan 11,9 persen menjawab tidak tahu. (DVD)